

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan Fifth Generation (5G) merupakan generasi kelima dari teknologi jaringan seluler yang menawarkan banyak peningkatan dibandingkan dengan pendahulunya, 4G. 5G membuka peluang untuk inovasi baru dalam berbagai industri, termasuk Kesehatan, manufaktur, transportasi, dan hiburan. Pada saat ini, negara-negara berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dalam teknologi 5G, mengingat potensi ekonomi dan dampak strategis dari penguasaan teknologi ini.

Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki posisi penting dalam pengembangan teknologi 5G. Inggris berperan dalam pengembangan standar global untuk teknologi 5G melalui partisipasi dalam organisasi internasional seperti *International Telecommunication Union (ITU)* dan *European Telecommunication Standards Institute (ETSI)*. Dalam pengembangan teknologi 5G, Inggris juga bekerjasama dengan Tiongkok melalui perusahaan Huawei.

Inggris melakukan kerjasama dalam pengembangan jaringan 5G dengan Huawei karena Tiongkok telah menjadi salah satu pemasok terbesar dari perangkat dan infrastruktur jaringan 5G di berbagai wilayah, termasuk Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika selatan.¹ Huawei, sebagai perusahaan teknologi asal Tiongkok telah menjadi perusahaan pemimpin dalam pengembangan teknologi dan pembangunan

¹ Advenia Widyaningrum, Ika Putranti, dan Marten Hanura, "Integrasi Faktor Struktur Dan Domestik Dalam Kebijakan Jaringan Bersih 5G Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump," *Journal of International Relations* 8 (2022): 629–643.

infrastruktur 5G secara global.² Huawei yang telah berpengalaman dalam infrastruktur 5G, berkerjasama dalam pengembangan jaringan 5G dengan Inggris. Inggris dan Huawei membangun pusat inovasi yang berfokus pada jaringan teknologi 5G.

Tiongkok meluncurkan proyek raksasa yang disebut dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) pada tahun 2013. Tujuan proyek BRI ini adalah untuk menghubungkan negara-negara peserta melalui infrastruktur, keuangan, perdagangan, diplomasi, dan konektivitas digital.³ Keterlibatan Huawei dalam kerjasama ini tidak dapat lepas dari pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memberikan dukungan yang signifikan kepada Huawei dalam bentuk subsidi, bantuan finansial, dan kebijakan yang mendukung. Dukungan ini membuat Huawei mampu menawarkan teknologi dengan harga yang lebih kompetitif di pasar global.⁴

Melalui BRI ini pemerintahan Tiongkok mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri. Kebijakan ini dibentuk untuk membuat perusahaan Tiongkok lebih kompetitif di pasar global dan mendorong untuk menjangkau sumber daya manusia yang berada di dunia dan investasi teknologi dari perusahaan asing.⁵ Huawei berhasil menerapkan strategi “Going Global” yang dirumuskan oleh pemerintahan Tiongkok. Selain itu, strategi *Made in China 2025*

² Advenia Widyaningrum, Ika Putranti, dan Marten Hanura, 629–643.

³ Gökhan Tekir, “Huawei, 5G Networks, and Digital Geopolitics,” *Source: International Journal of Politics and Security* 2, no. 4 (2020): 113–35.

⁴ Noah Berman, Lindsay Maizland, and Andrew Chatzky, “Is China’s Huawei a Threat to U.S. National Security?,” Council on Foreign Relations, 8 Februari 2023, <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-huawei-threat-us-national-security>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2024.

⁵ Heino Klinck, “The Strategic Implications of Chinese Companies Going Global,” 2012, <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA570470.pdf>.

yang diumumkan pada tahun 2015 memperkuat klaim Tiongkok dalam memproduksi produk-produk berteknologi tinggi.

Pada tahun 2007, Perusahaan telekomunikasi terbesar di Inggris, *British Telecom* (BT), telah menjadi operator Inggris pertama yang menggunakan peralatan Huawei di seluruh jaringannya.⁶ Kerjasama ini mencakup pengujian dan implementasi awal teknologi 5G pada jaringan telekomunikasi Inggris. Pemerintah Inggris mengizinkan perusahaan Tiongkok untuk terlibat dalam pembangunan 35% bagian peripheral sistem dan Pusat Evaluasi keamanan Siber Huawei dalam upaya untuk menenangkan masalah keamanan dengan menjaga peralatan Huawei tetap terkendali⁷. Semenjak itu, peran Huawei di pasar Inggris tampak besar dan mengakar.

Pada awalnya kerjasama antara Tiongkok dan Inggris berjalan lancar selama 18 tahun dengan efektif. Kehangatan hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Inggris dapat terlihat dengan tercapainya target besaran investasi 5 tahun dan target pengadaan senilai £ 2 Miliar pada tahun 2012. Selain itu, ada juga program *Seeds for the Future* yakni sebuah program pemberian beasiswa untuk mahasiswa Inggris agar mendapatkan perjalanan studi ke Tiongkok setiap tahunnya. Program

⁶ UK Parliament, "Government Response to the Intelligence and Security Committee's Report of Session 2013-14: Foreign Involvement in the Critical National Infrastructure," 2013.

⁷ Charles Parton, "China-UK Relations: Where to Draw the Border between Influence and Interference?," *Www.rusi.org*, 19 Februari 2019, <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/occasional-papers/china-uk-relations-where-draw-border-between-influence-and-interference>. Diakses pada 4 Juni 2024.

beasiswa ini bentuk pengembangan dan inovasi antara Huawei dan universitas terbaik di Inggris.⁸

Hasil dari kerjasama ini terlihat dengan adanya pengeluaran untuk *Research and Development* (R&D), pelatihan internal, dan eksternal membuktikan bahwa kerjasama ini juga telah mendukung terhadap sektor ekonomi Inggris yang berguna untuk meningkatkan kapabilitas dan keahlian angkatan kerja. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan kapasitas produktif ekonomi. Tiongkok telah membentuk R&D di 6 lokasi di Inggris pada tahun 2019. Tiongkok juga menghabiskan £ 1,1 juta untuk pelatihan kejuruan pada tahun 2019 agar bisa meningkatkan keahlian karyawannya sendiri.⁹

Seiring dengan meningkatnya kehadiran Huawei di Inggris, muncullah kecurigaan seputar infrastruktur jaringan 5G Huawei. Kecurigaan dipicu oleh kekhawatiran bahwa peralatan dan sistem 5G mereka dapat disalahgunakan untuk tujuan spionase atau bahkan sabotase yang dilakukan oleh Tiongkok.¹⁰ Kekhawatiran ini didasarkan pada kemungkinan bahwa pemerintah Tiongkok dapat mengakses data dan jaringan yang dibangun oleh Huawei. Karena kekhawatiran terhadap ancaman keamanan nasional, Inggris melarang penggunaan Huawei dalam jaringan 5G mereka.

⁸ Huawei, "Huawei - Seeds for the Future," www.huawei.com, 2021, <https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/index.html>. Diakses 15 Maret 2024.

⁹ Oxford Economics, "The Economics Impact of Huawei in the UK," 19 November 2020.

¹⁰ Madison Cartwright, "Internationalising State Power through the Internet: Google, Huawei and Geopolitical Struggle," *Internet Policy Review* 9, no. 3 (2020): 1–18.

Keputusan ini diumumkan pada Juli 2020 oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menekankan bahwa keputusan ini didasarkan pada penilaian keamanan dan risiko teknis yang menyeluruh dari Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris (NCSC). Selain itu, keputusan untuk melarang Huawei dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga kepercayaan infrastruktur digital Inggris dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak dapat dimanipulasi oleh negara asing untuk tujuan merugikan kepentingan nasional Inggris.¹¹

Keputusan ini juga dipertegas dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Digital, Oliver Dowden, menyatakan bahwa Inggris memutuskan untuk melarang Huawei dari jaringan 5G mereka karena masalah keamanan yang signifikan. Dowden menekankan bahwa tindakan ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan ketahanan infrastruktur 5G Inggris. Dia menekankan juga bahwa kehadiran vendor “berisiko tinggi” (Huawei) dapat mengancam keamanan nasional, sehingga Inggris harus mempertahankan keamanan infrastruktur teknologinya.¹²

Ditengah konflik ini, Inggris yang awalnya mengizinkan Tiongkok untuk berperan dalam pengembangan jaringan 5G di negara tersebut. Namun, kemudian secara tiba-tiba mengubah kebijakan dan melarang Huawei sepenuhnya. Perubahan sikap yang mendadak ini menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu, penelitian ini

¹¹ Foreign & Commonwealth Office, “Foreign Secretary’s Statement on Huawei,” GOV.UK, 28 Januari 2020, <https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-statement-on-huawei>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2024.

¹² Departement for Digital, Culture, Media & Sport, “Digital, Culture, Media and Sport Secretary’s Statement on Telecoms,” GOV.UK, 14 July 2020, , <https://www.gov.uk/government/speeches/digital-culture-media-and-sport-secretarys-statement-on-telecoms>. Diiakses 11 Juni 2024.

perlu untuk menganalisis apa penyebab kebijakan Inggris menghentikan kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G.

1.2 Rumusan Masalah

Kerjasama Inggris dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G ini dikarenakan Huawei adalah pemimpin global dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur 5G. Kerjasama teknologi 5G antara Inggris dengan Tiongkok sangat mempengaruhi sektor ekonomi, lapangan pekerjaan, keterampilan staff, serta perpajakan di Inggris. Setelah kerjasama Inggris dengan Tiongkok ini selama 18 tahun, timbulnya kekhawatiran bahwa infrastruktur jaringan telekomunikasi Huawei memiliki ancaman terhadap keamanan nasional Inggris. Kekhawatiran pemerintah Inggris atas potensi ancaman keamanan nasional membuat mereka menghentikan kerjasama dengan Tiongkok dalam bidang teknologi. Melalui penjelasan diatas, penelitian ini akan menganalisis apa penyebab kebijakan Inggris menghentikan kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah: “Apa penyebab kebijakan Inggris menghentikan kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan Inggris dalam menghentikan kerjasama pengembangan teknologi 5G dengan Tiongkok.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis sebagai sumber informasi terkait kepentingan kebijakan Inggris dalam menghentikan kerjasama teknologi 5G dengan Tiongkok. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi lebih dalam mengenai kebijakan luar negeri terkhususnya kebijakan luar negeri Inggris dan memahami alasan pemutusan kerjasama Inggris-Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G dengan perusahaan Huawei.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik oleh akademisi dalam melihat dan menganalisis kebijakan Inggris memutuskan kerjasama Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G dengan perusahaan Huawei. Serta dapat memberikan sudut pandang yang lain sekaligus mempertajam analisis pembaca khususnya bagi pembuat kebijakan luar negeri dan pengamat konflik Inggris-Tiongkok.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjelaskan apa kepentingan Inggris memutuskan kerjasama Tiongkok dalam pengembangan teknologi 5G dengan Huawei, penelitian ini menggunakan beberapa referensi yang dijadikan sebagai acuan dan panduan dalam meneliti.

Pertama, artikel dari Vahid Nick Pay dan Piotr Buszta yang berjudul “*China in the UK’s Foreign Policy Shifting to Progressive Liberal Internationalism*”.¹³ Penelitian ini berisi perubahan dalam kebijakan luar negeri Inggris terhadap Tiongkok dari tahun 2015 hingga 2022, terutama setelah Brexit. Dengan memanfaatkan kebijakan “Global Britain” artikel ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan Inggris terhadap Tiongkok dan bagaimana perubahan ini mencerminkan pergeseran ke arah progresif liberal internasionalisme.

Dalam artikel ini, kebijakan luar negeri Inggris sedang dalam fase redefinisi setelah Brexit, dan salah satu prioritas utamanya adalah mengatur ulang hubungan dengan aktor global utama seperti Tiongkok. Pada periode awal (2010-2015), Inggris mengadopsi pendekatan liberal ekonomi terhadap Tiongkok yang dikenal sebagai *modus vivendi liberalism*. Kunjungan kenegaraan Presiden Xi Jinping pada tahun 2015 menandai dimulainya era yang disebut “Golden Era” dalam hubungan bilateral. Inggris berfokus pada perdagangan dan investasi dengan Tiongkok.

Setelah tahun 2016, terutama dengan keputusan untuk melarang Huawei dalam infrastruktur 5G Inggris, terjadi pergeseran signifikan dalam kebijakan Inggris

¹³ Vahid Nick Pay dan Piotr Buszta, “China in the UK’s Foreign Policy Shifting to Progressive Liberal Internationalism,” *European Journal of East Asian Studies* 21 (2022): 372–94.

terhadap Tiongkok. Inggris mulai menekankan nilai-nilai progresif liberal, seperti demokrasi dan hak asasi manusia yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan dengan Tiongkok. Perubahan ini dipicu oleh kekhawatiran keamanan nasional dan pentingnya hubungan khusus dengan Amerika Serikat.

Artikel ini dapat membantu pada penelitian ini dalam membahas perubahan kebijakan luar negeri Inggris terhadap, termasuk pelarangan penggunaan teknologi 5G Huawei. Jurnal ini juga dapat membantu dalam penelitian ini menganalisis Huawei dan bagian telekomunikasi 5G Inggris.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Alanna Krolkowski dan Todd H. Hall yang berjudul “*Non-Decision Decisions in the Huawei 5G Controversy Policy in Japan, the United Kingdom, and Germany*”.¹⁴ Dalam artikel ini menjelaskan tentang perusahaan Tiongkok, Huawei, telah menghadirkan dilemma kebijakan kepada pemerintah negara-negara kekuatan menengah. Teknologi jaringan 5G Huawei yang terjangkau menarik bagi operator telekomunikasi di negara Jepang, Inggris, dan Jerman, yang tidak memiliki produsen peralatan ini dalam negeri. Pemerintah AS dan badan-badan intelijen di negara-negara lain berpendapat bahwa peralatan Huawei menimbulkan resiko keamanan jaringan yang tidak dapat ditoleransi.

Pemerintahan Jepang, Inggris, dan Jerman terjebak diantara tuntutan yang saling bersaing dari dua negara adidaya (AS dan Tiongkok) yang saling bersaing dan menghadapi perpecahan internal diantara komunitas-komunitas di negara

¹⁴ Alanna Krolkowski dan Todd H. Hall, “Non-Decision Decisions in the Huawei 5G Controversy Policy in Japan, the United Kingdom, and Germany,” *Japanese Journal of Political Science* 24, no. 2 (2023): 171–89.

tersebut. Sekilas Jepang, Inggris, dan Jerman tampaknya merespons dilema Huawei dengan cara yang berdeda. Pemerintah Jepang bergerak cepat dan tanpa pengumuman resmi untuk mengecualikan Huawei dari pasarnya, namun secara terbuka menolak larangan tersebut. Pemerintah Inggris pada awalnya mengizinkan Huawei untuk memasuk beberapa infrastruktur 5G nasionalnya, namun kemudian membatalkan kebijakan tersebut dan langsung melarang peralatan perusahaan tersebut setelah adanya perubahan peraturan AS. Pemerintah Jerman belum secara resmi melarang Huawei, namun telah mengambil langkah-langkah berturut-turut untuk membatasi keterlibatan perusahaan Tiongkok tersebut dalam jaringan domestiknya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dengan perbedaan respon dari ketiga negara tersebut terhadap dilema Huawei. Penelitian ini melihat dari perspektif “Non-Decision Decision”. Terlihat dalam artikel ini masing-masing pemerintahan menghindari pengambilan keputusan kebijakan yang eksplisit, *definitive*, dan tunggal mengenai permasalahan ini. Artikel ini juga menjelaskan manuver-manuver ini bukan merupakan respons terisolasi terhadap teka-teki kebijakan tertentu, namun mungkin menunjukkan mode kekuatan menengah dalam menghadapi tuntutan yang bersaing dari dua negara adidaya yang saling bersaing. Sedangkan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis akan menguraikan mengapa Inggris mengubah kebijakannya terkait Huawei setelah adanya intervensi dari AS.

Ketiga, artikel yang dibuat oleh Gökhan Tekir, yang berjudul “Huawei, 5G Network and Digital Geopolitics”.¹⁵ artikel ini menjelaskan perubahan dalam persaingan global yang tidak lagi hanya berfokus pada kontrol teritorial tetapi juga pada pengaruh atas jaringan, pusat, dan layanan digital. Ini menempatkan persaingan 5G antara AS dan Tiongkok dalam konteks yang lebih luas dari geopolitik digital, yang melibatkan bukan hanya negara tetapi juga badan regional dan perusahaan multinasional.

Artikel ini menjelaskan bagaimana AS, setelah melarang Huawei di pasar domestik, berusaha menekan negara-negara Eropa untuk mengikuti langkah yang sama dengan menggunakan ancaman larangan perdagangan. Ini mencerminkan bagaimana AS menggunakan pengaruh ekonominya untuk mendorong sekutu-sekutunya agar memutuskan hubungan dengan Huawei, meskipun sering kali tidak menawarkan alternatif yang layak.

Artikel ini membahas persaingan global baru antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang dibentuk oleh akses ke aliran jaringan, dengan fokus khusus pada jaringan 5G. Tiongkok telah melampaui AS dalam pengembangan teknologi 5G melalui perusahaannya, Huawei, dan berusaha untuk memperluas pasar global. AS melihat ekspansi digital Tiongkok sebagai ancaman keamanan dan mencoba membatasi akses Huawei ke pasar global. Persaingan ini tidak hanya melibatkan negara-negara tetapi juga badan regional seperti Uni Eropa dan perusahaan multinasional.

¹⁵ Gökhan Tekir, 113–35.

Perbedaan artikel ini dapat dilihat dengan persaingan antara AS dan Tiongkok di bidang teknologi 5G mencerminkan perubahan dalam pola geopolitik global. Sementara penelitian yang dibuat oleh penulis akan menjelaskan ketergantungan dan pengaruh atas jaringan digital dan teknologi informasi menjadi medan pertempuran baru dalam geopolitik global, dengan implikasi signifikan bagi kebijakan dan strategi internasional.

Keempat, penelitian yang diketik oleh Karsten Friis dan Olav Lysne, yang berjudul "*Huawei, 5G and Security: Technological Limitations and Political Responses*".¹⁶ Tulisan ini memaparkan bagaimana bisa jaringan 5G dari Huawei menjadi perhatian keamanan di AS dan Eropa. Dalam tulisan ini dapat melihat bagaimana makrosekuritas AS terhadap Tiongkok, dan sekuritas khusus yang menyertai pada telekomunikasi Tiongkok dan 5G, muncul dan berkembang, baik di dalam negeri maupun di Eropa. Dalam tulisan ini berpendapat bahwa fitur-fitur teknologi dari teknologi 5G, dikombinasikan dengan peran sentral yang diharapkan akan dimainkan oleh teknologi ini di masyarakat barat.

Dapat dilihat juga bahwa penyaringan atau mekanisme kontrol serupa tidak akan mengatasi permasalahan utama yang diangkat oleh aktor sekuritas, seperti spionase dan sabotase. Dengan begitu, keamanan 5G tidak dapat diselesaikan pada tingkat teknis saja, namun kemungkinan besar juga dapat disekuritisasi pada tingkat politik. Dalam tulisan ini juga menemukan bahwa sebagian besar Eropa telah memilih pendekatan yang agak berbeda terhadap AS. Meskipun negara-negara

¹⁶ Karsten Friis dan Olav Lysne, "Huawei, 5G and Security: Technological Limitations and Political Responses," *Development and Change* 52, no. 5 (September 2021): 1174–95.

Eropa juga melakukan sekuritisasi 5G, mereka sebagian besar membatasi pada aspek hukum-politik dan menghindari sekuritisasi eksplisit terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Perbandingan tulisan ini dibuat untuk menunjukkan pentingnya memahami faktor material atau teknologi dan ketika mempelajari sekuritisasi teknologi yang kompleks. Tulisan ini lebih membahas aspek politik dan teknis sekuritisasi 5G. Dalam tulisan ini juga menggunakan teori sekuritisasi. Sedangkan penelitian yang dibuat membahas bagaimana respon Inggris setelah AS menekan kepada negara-negara sekutunya setelah AS mengancam jika bekerjasama dengan Huawei.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ewan Sutherland, yang berjudul “*5G security– The politics of Huawei equipment in the United Kingdom*”.¹⁷ Dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana Inggris bisa mengambil keputusan untuk menerapkan larangan langsung, meskipun secara dilakukan secara bertahap. Selama 15 tahun Inggris mengizinkan pemasangan peralatan jaringan dari Huawei, dengan tunduk pada pengaturan keamanan khusus. Namun meningkatnya tekanan politik AS, pergeseran partai konservatif ke sayap kanan, dan faktor domestik lainnya menyebabkan meningkatnya dukungan parlemen terhadap pengecualian Huawei. Setelah berbulan-bulan melakukan pertimbangan dan evaluasi, pemerintah Boris Johnson menerapkan larangan terbatas terhadap operator yang menggunakan peralatan 5G dari Huawei pada bulan Januari 2020.

¹⁷ Ewan Sutherland, “5G Security – the Politics of Huawei Equipment in the United Kingdom,” *SSRN Electronic Journal*, 17 Juli 2020.

Tuduhan terhadap Huawei memiliki beragam masalah, hanya sedikit yang berkaitan dengan keamanan siber pada peralatan jaringannya. Sebelum Inggris menyerahkan, Amerika secara mengejutkan tidak berhasil membujuk negara-negara sekutunya untuk menjauhi Huawei. Hal ini mencerminkan sikap Presiden Trump yang sangat angkuh terhadap sekutu tradisionalnya dan sikapnya yang bahkan lebih angkuh terhadap kebenaran. Politisi AS jelas-jelas berusaha mengambil keuntungan dari keinginan Inggris untuk perjanjian perdagangan pasca-brexit. Kompromi awal ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara kekhawatiran AS dan konsumen domestik yang harus menunggu lebih lama dan membayar lebih untuk 5G.

Dalam artikel ini mengatakan bahwa jika masalahnya benar-benar pada keamanan jaringan 5G maka pemerintah Inggris akan menghilangkan peralatan Huawei jauh lebih awal dan juga melarang konsumen membeli perangkatnya, beralih membeli dari pemasok alternatif dan lebih mahal. Hal ini juga akan mengubah cara pendekatannya terhadap pengembangan sistem 6G untuk memastikan keamanan yang lebih tinggi. Yang terpenting, hal ini akan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti kebijakan eksklusif tersebut. Salah satu penjelasannya adalah bahwa Huawei adalah representasi dari kebangkitan manufaktur Tiongkok, strategi *Made in China 2025*, dan inisiatif *Belt and Road Initiative*. Politisi Inggris mungkin khawatir dengan dukungan Tiongkok terhadap rezim otoriter, karena rezim tersebut menawarkan teknologi canggih untuk memantau populasi mereka.

Perbandingan artikel ini dapat dilihat dari AS tidak hanya menyerang Huawei, namun juga penyedia aplikasi yang berbasis di Tiongkok. Sementara penelitian yang dibuat oleh penulis menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal dari keputusan Inggris untuk melarang Huawei beroperasi di Inggris.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Foreign Policy Analysis

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri melibatkan beberapa prosedur dan aktor. Hal ini sangat penting dalam urusan internasional suatu negara. Kedudukan dan reputasi suatu negara di kancah global cenderung menurun tanpa adanya kebijakan luar negeri yang solid, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pemenuhan kepentingan nasionalnya, sedangkan sebaliknya bagi negara-negara yang kebijakan luar negerinya telah dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu pemahaman menyeluruh mengenai definisi dari kebijakan luar negeri menjadi sangat penting bagi para pengambil kebijakan dan akademisi.

Kebijakan luar negeri adalah program yang mencakup pola perilaku dan rencana mengenai seperangkat tindakan atau aturan yang mengatur tindakan otoritas politik independent yang ditempatkan di lingkungan internasional.¹⁸ Kajian kebijakan luar negeri secara unik menjembatani kajian hubungan internasional dan politik dalam negeri dengan mempertimbangkan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku negara.

¹⁸ Morin Jean-Frédéric and Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis : A Toolbox* (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018).

Kaum realis menekankan pentingnya kondisi internasional, struktur anarkis sistem internasional dan lingkungan strategis masing-masing negara bagi kebijakan luar negeri. Semua politik pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan, tetapi politik kekuasaan berjalan berbeda dalam politik internasional dan domestik, karena tidak ada monopoli kekuasaan yang sah dalam hubungan internasional (HI), yaitu struktur sistem internasional bersifat anarkis. HI berlangsung dalam 'self-help system', dimana setiap negara perlu menjaga keamanan dan kelangsungan hidupnya sendiri.¹⁹

Realis mengharapkan negara-negara yang kuat menjadi lebih aman, memiliki ruang tindakan kebijakan luar negeri yang lebih besar, dan karena itu peran yang lebih besar untuk politik dalam negeri, dan cakupan geografis yang lebih besar dalam kebijakan mereka daripada negara-negara yang lebih lemah. Realis juga mengharapkan negara-negara yang kuat untuk lebih bersedia dan berinvestasi dalam mempertahankan tatanan internasional yang sedang berkembang daripada negara-negara yang lebih lemah, karena yang pertama memiliki saham yang lebih besar dalam sistem daripada yang terakhir.²⁰

Tetapi, upaya negara-negara besar untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka dalam sistem dapat membawa mereka ke dalam perang dengan negara-negara besar pesaing lainnya, ketika negara-negara besar yang baru muncul menantang posisi hegemoni regional dan global. Contohnya, kekuatan yang sedang naik dan

¹⁹ Juliet Kaarbo and Cameron Theis, *The Oxford Handbook of Foreign Policy Analysis* (Oxford University Press, USA, 2024).

²⁰ Juliet Kaarbo and Cameron Theis, 2024.

seperti Tiongkok, dan hegemon yang sedang menurun, yakni Amerika Serikat.²¹ Jika negara-negara yang lebih kecil dan lebih lemah bergantung pada negara-negara besar untuk penyediaan barang-barang publik, kebijakan luar negeri mereka cenderung adaptif, reaktif, dan memperhatikan harapan negara-negara besar.

Dua pengamatan tentang realisme dan FPA mengikuti dari diskusi singkatan ini:

1. Anarki adalah struktur insentif, bukan penentu kebijakan luar negeri. Struktur memengaruhi perilaku dalam suatu sistem tetapi melakukannya secara tidak langsung. Struktur anarkis merupakan ‘kerangka politik dunia’, tetapi tanpa pembuat keputusan individu dan masyarakat domestik ‘tidak akan ada pengetahuan tentang kekuatan yang menentukan kebijakan’.
2. Dengan menekan kekuasaan, ketidaksetaraan, dan konflik, fokus pada dampak anarki internasional terhadap kebijakan luar negeri memberi kita bahasa alternatif untuk menggambarkan dan memahami kebijakan luar negeri dibandingkan dengan sebagian besar pembuat kebijakan dan elit kebijakan luar negeri.

Menurut Kaarbo dan Thies, mencatat bahwa Realisme neoklasik dalam FPA tidak mengabaikan faktor-faktor eksternal terhadap negara, meskipun analisis kebijakan luar negeri cenderung menekankan peran politik dalam negeri dan proses pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri.²² Realisme neoklasik paling sering dipahami

²¹ Graham T Allison, *Destined for War : Can America and China Escape Thucydides’s Trap?* (Boston: Mariner Books, 2017).

²² Juliet Kaarbo dan Cameron Theis, *The Oxford Handbook of Foreign Policy Analysis* (Oxford University Press, USA, 2024).

sebagai teori kebijakan luar negeri atau sekelompok teori yang berbagi keyakinan ‘bahwa ruang lingkup dan ambisi kebijakan luar negeri suatu negara didorong oleh tempatnya dalam sistem internasional dan khususnya oleh kemampuan kekuatan material relatifnya’. Realis neoklasik berpendapat bahwa negara-negara merespons sebagian besar kendala dan peluang sistem internasional, ketika mereka melakukan kebijakan luar negeri dan keamanan mereka, tetapi respons mereka dibentuk oleh faktor-faktor tingkat unit. Realis neoklasik ini dapat menyusun analisis sebagai proses dua langkah:

1. Mengidentifikasi sifat dan kejelasan insentif dari anarki internasional.
2. Mengidentifikasi bagaimana para pembuat keputusan tertanam dalam lembaga dan wacana domestik menanggapi insentif dengan membuat keputusan kebijakan luar negeri dan merumuskan strategi nasional.

Seperti yang dicatat oleh Juliet Kaarbo, dalam hal politik dalam negeri, realisme neoklasik dicirikan oleh variasi dalam orientasi ontologis, beberapa fokus pada eksekutif kebijakan luar negeri, yang lain pada bagaimana eksekutif ini dibatasi oleh politik dan birokrasi dalam negeri, dan yang lain lagi pada bagaimana faktor-faktor ideasional seperti ideologi dan nasionalisme menyusun wacana dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.²³ FPA realis neoklasik ditempatkan pada kontinum dari studi yang menganalisis kebijakan luar negeri sebagai hasil dari kombinasi perebutan kekuasaan internasional dan domestik atas klaim bahwa struktur geopolitik

²³ Juliet Kaarbo, “A Foreign Policy Analysis Perspective on the Domestic Politics Turn in IR Theory,” *International Studies Review* 17, no. 2 (17 Maret 2015): 189–216.

bersifat eksternal dan mengikat negara, tetapi persepsi pembuat kebijakan negara memengaruhi operasionalisasi struktur ini.²⁴

Dalam realisme neoklasik ini, struktur internasional dianggap anarkis, yang berarti tidak ada otoritas global yang mengatur hubungan antar negara. Dalam kondisi ini, negara-negara bertindak untuk memastikan keamanan dan kelangsungan negaranya sendiri yang sering disebut dengan prinsip “self-help”. Power distribution (Distribusi kekuatan) dalam sistem internasional mempengaruhi ruang lingkup dan ambisi kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya, negara kuat memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk bertindak dibandingkan negara kecil. Seperti Amerika Serikat (negara kuat) yang dapat mempengaruhi Inggris dalam kerjasama jaringan 5G ini.²⁵

Anarki dianggap sebagai kerangka insentif, bukan pengendali langsung. Realisme neoklasik mengakui bahwa struktur anarkis menciptakan insentif tertentu bagi negara, seperti membentuk aliansi atau meningkatkan kapabilitas militer. Dalam hal ini, Inggris tergabung dalam Five Eyes Alliance untuk meningkatkan kapabilitas keamanan intelijen negaranya. Selain itu, geopolitik juga merupakan bagian integral struktur internasional yang menyoroti dinamika kekuatan besar serta zona pengaruh dan aliansi strategis yang mencerminkan upaya negara untuk memaksimalkan keamanan dan kekuasaan mereka di wilayah tertentu. Dalam realisme neoklasik, geopolitik dilihat sebagai dimensi fisik dan strategis dari struktural internasional yang menciptakan tekanan dan peluang untuk kebijakan luar negeri. Persaingan geopolitik,

²⁴ Michiel Foulon, “Neoclassical Realism: Challengers and Bridging Identities,” *International Studies Review* 17, no. 4 (September 2015): 635-661.

²⁵ Juliet Kaarbo dan Cameron Theis, 2024.

seperti dalam kasus AS-Tiongkok, mempengaruhi pilihan negara-negara lain (seperti Inggris) dalam membentuk aliansi atau mengambil kebijakan tertentu.

Dalam realisme neoklasik, struktur domestik memiliki peran penting dalam menjembatani pengaruh struktur internasional terhadap kebijakan luar negeri. Realisme neoklasik menyadari bahwa tekanan internasional tidak langsung menentukan tindakan negara, tetapi dimediasi oleh termasuk persepsi pembuat kebijakan negara, tekanan politik domestik, serta ideologi dan identitas nasional. Realisme neoklasik menekankan bahwa persepsi para pembuat kebijakan terutama pemimpin memiliki peran kunci dalam menafsirkan tekanan internasional dan mengarahkan kebijakan luar negeri. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman, ideologi, dan penilaian pribadi pemimpin terhadap ancaman atau peluang. Seperti pemerintah Inggris, dibawah Boris Johnson menilai bahwa mempertahankan aliansi dengan AS lebih penting daripada hubungan kerjasama jaringan 5G dengan Tiongkok.²⁶

Tekanan politik domestik seperti opini publik, media, dan kelompok kepentingan dapat membatasi atau mendorong kebijakan tertentu. Sistem politik juga mempengaruhi sejauh mana pemimpin dapat bertindak secara independen terhadap tekanan domestik. Contohnya, opini publik dan partai konservatif memberikan tekanan signifikan kepada pemerintah untuk melarang Huawei, dan menekankan resiko keamanan nasional Inggris. Nilai-nilai yang melekat dalam budaya strategis suatu negara membentuk preferensi kebijakan luar negeri. Misalnya, negara dengan identitas

²⁶ Michiel Foulon, September 2015.

nasional yang kuat mungkin lebih cenderung untuk memprioritaskan kedaulatan dibandingkan kerjasama internasional. Seperti Inggris yang memiliki nilai-nilai demokrasi dan ideologi yang sama dengan AS, yang menekan penguatan aliansi dengan sekutu lama mereka yaitu AS.

Jadi pada intinya, realisme mengingatkan kita tentang pentingnya politik kekuasaan yang berkelanjutan. Realis mengungkap tantangan dan peluang kebijakan luar negeri yang mengikuti dari struktur anarkis sistem internasional. Mereka menjelaskan bagaimana kekuatan relatif penting bagi apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan negara, dan memperdebatkan apakah strategis besar ofensif dan defensi paling baik melayani negara. Realis neoklasik memfokuskan perhatiannya pada bagaimana insentif dari anarki internasional dan lingkungan strategis negara memengaruhi kebijakan luar negeri.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menggambarkan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah tertentu, serta menggunakan beragam metode ilmiah.²⁷ Data dan sumber yang diperoleh diolah menggunakan pendekatan

²⁷ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

kualitatif, dimana analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian ini lebih menekankan pada interoretasi makan daripada pembuatan generalisasi.

1.8.2 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi waktu penelitian dengan rentang 2020-2023. Batas penelitian pada tahun 2020 tersebut dipilih karena Inggris memutuskan kerjasama teknologi 5G ini pada tahun ini. Selanjutnya pada tahun 2023 batasan penelitian dikarenakan sampe tahun 2023 yang bisa dianalis untuk pemutusan kerjasama Inggris dengan Huawei ini secara bertahap. Pemutusan total kerjasama ini pada tahun 2027.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Dalam sebuah penelitian terdapat unit analisis, unit eksplanasi, dan tingkat analisa. Unit analisis adalah objek yang menjadi fokus dari analisis dalam suatu penelitian ilmu hubungan internasional. Sedangkan unit eksplanasi adalah variable yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dalam penelitian ilmu hubungan internasional.²⁸ Unit analisis dari penelitian ini adalah Kebijakan Inggris dalam menghentikan kerjasama. Sedangkan unit eksplanasinya adalah faktor penghentian kerjasama Inggris dengan Tiongkok dalam pengembangan jaringan 5G.

Menurut Mohtar Mas'ood terdapat beberapa tingkat analisis yaitu berupa individu, kelompok, negara, organisasi internasional, atau fenomena politik lainnya

²⁸ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

yang diteliti untuk memahami dinamika politik. Dalam penelitian ini, level analisisnya adalah sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, seperti data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, situs resmi atau data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Ini adalah data yang telah disajikan dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang sedang diteliti.

Dalam pengumpulan data secara sekunder, peneliti memperoleh informasi dan sumber melalui: 1) Situs resmi: Peneliti mengumpulkan data sekundernya melalui tautan <https://www.gov.uk> dan <https://www.parliament.uk>; 2) Sumber berita *online*: Peneliti juga mengumpulkan data dan sumber dari situs <https://www.thetimes.co.uk>, <https://www.bbc.com>, dan www.theguardian.com; 3) Artikel Jurnal: terdapat beberapa jurnal yang digunakan peneliti sebagai referensi yakni jurnal yang ditulis oleh Vahid Nick Pay dan Piotr Buszta yang berjudul “*China in the UK’s Foreign Policy Shifting to Progressive Liberal Internationalism*”, Alanna Krolikowski dan Todd H. Hall yang berjudul “*Non-Decision Decisions in the Huawei 5G Controversy Policy in Japan, the United Kingdom, and Germany*”, Karsten Friis dan olav Lysne “*Huawei, 5G and Security: Technological Limitattions and Political Responses*”, “*Huawei 5G Networks, and Digital Geopolitics*” yang dibuat oleh Gökhan Tekir, “*5G security – The politics of Huawei equipment in the United Kingdom*” oleh Ewan Sutherland, dan beberapa artikel jurnal lainnya yang mendukung penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut pandangan Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga langkah untuk menganalisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁹

1. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah langkah menyederhanakan, menggabungkan, serta memilih informasi yang penting, mengelompokkan, dan menyoroti hal-hal yang penting dalam topik dan pola yang sama. Data yang telah disederhanakan akan lebih terperinci dalam menjelaskan dan memfasilitasi peneliti dalam mengumpulkan data pada langkah berikutnya.

Tujuannya adalah untuk membuat data lebih dapat diandalkan. Kondensasi data terjadi secara berkelanjutan selama penelitian yang berfokus pada kualitas. Selama proses pengumpulan data, proses tambahan dalam kondensasi data dapat terjadi, seperti merangkum, mengodekan, mengembangkan topik, membuat kategori, dan membuat catatan analitis.

Kondensasi data adalah bentuk analisis yang membersihkan, mengurutkan, menekankan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan “*final*” dapat dihasilkan dan diverifikasi. Peneliti harus memutuskan bagian data mana yang akan dikodekan, bagian mana yang akan

²⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M. dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. Third Edit. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE Publications, Inc. (2014).

diekstraksi, label kategori mana yang paling sesuai, dan cerita apa yang akan disampaikan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah rangkuman informasi yang terstruktur dan ringkas, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa disajikan melalui berbagai cara seperti narasi singkat, diagram, interkoneksi antara kategori, *flowchart*, dan metode lainnya. Biasanya, penyajian data dalam penelitian kualitatif mengadopsi format narasi teks, yang kadang-kadang disertai dengan grafik, matriks, diagram, atau format serupa. Melalui observasi terhadap penyajian data, peneliti dapat memahami perkembangan dan mengambil langkah analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/ verification*)

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis dimana peneliti menarik dan mengkonfirmasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, analisis kualitatif mencoba untuk menaksirkan makna dengan mencatat pola, penjelasan, kausalitas, dan asumsi. Penelitian kualitatif mengutamakan penemuan baru sebagai hasil akhir dari kesimpulan penelitiannya. Penemuan baru ini bisa berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya tidak jelas, namun setelah diteliti menjadi lebih terperinci. Ini bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

Peneliti membuat kesimpulan dengan hati-hati, menjaga sikap terbuka dan skeptis, meskipun kesimpulan awalnya mungkin sama dan kurang jelas, namun

menjadi lebih jelas dan rasional seiring berjalannya waktu. Hasil akhir dari analisis mungkin tidak terwujud sampai semua data terkumpul, tergantung pada jumlah data yang dikumpulkan. Metode pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan data yang digunakan, serta kemampuan analisis, menjadi faktor penting dalam proses ini, sementara peneliti juga harus memperhatikan Batasan waktu yang ada.



1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian (dimana mencakup jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), hingga sistematika penulisan.

BAB II INGGRISS DALAM MENGENGEMBANGKAN JARINGAN 5G

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana awal mulanya Inggris tertarik dengan teknologi jaringan 5G, termasuk sejarah berkembangnya jaringan telekomunikasi di Inggris dan kerjasama Inggris dengan negara lain dalam mengembangkan jaringan 5G. Serta perkembangan infrastruktur jaringan 5G Inggris setelah Brexit.

BAB III TIONGGKOK DALAM MENGENGEMBANGKAN JARINGAN 5G

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana Tiongkok mengembangkan jaringan 5G termasuk awal mula bagaimana bisa Tiongkok menjadi pemimpin 5G di Internasional (Huawei), hubungan Huawei dengan Tiongkok, awal mula kerjasama Tiongkok dengan Inggris dalam mengembangkan jaringan 5G.

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN INGGRISS MEMUTUSKAN KERJASAMA DENGAN TIONGGKOK DALAM MENGENGEMBANGKAN TEKNOLOGI 5G

Dalam bab ini menjelaskan faktor-faktor kebijakan Inggris menghentikan kerjasama dalam menjaga dan melindungi keamanan nasional, serta menjaga hubungan stabilitas dengan AS.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.